

**BASRA Ulama and Medina Porph of Madura;
Portrait of religious freedom in Madura****Mukhlishi & Surya Fajar Rasyid**

Dosen STKIP PGRI Sumenep

E-Mail: lisyi@stkipppgrisumenep.ac.id**Abstrak**

Gagasan Ulama BASRA tentang kebebasan agama di Madura menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk diangkat ke permukaan, pemikiran tentang masalah kebebasan agama yang menjadi cita-cita BASRA di Madura merupakan sesuatu yang faktual untuk ditransformasi di tengah wacana menjadikan Madura sebagai serambi Madinah Ulama Madura yang tergabung dalam BASRA mencoba untuk mentransformasikan ajaran Islam terutama terkait dengan kebebasan dari yang bersifat normatif menjadi praksis. Untuk kepentingan ini, model pemahaman yang dilakukan variatif, mulai dari pemahaman kultural dengan masyarakat umum, hingga pemahaman yang terkatagori struktural yakni selektif dan mengkritisi serta mengkaji kebijakan pemerintah yang dapat mengikis budaya Indonesia secara umum dan Madura secara khusus. Pada era digital ini banyak saling serang dengan menggunakan label SARA, padahal NKRI sudah final yang berarti harus berpikiran Maju yang telah bersepakat kita hidup dalam keberagaman yang itu juga pernah dipraktekkan nabi dalam piagam Madinah yang mampu mengayomi kaum minoritas seperti Yahudi dan Nasrani.

Kata Kunci : Ulama BASRA, Serambi Madinah dan Kebebasan Bergama**Abstract**

The idea of BASRA piousman about religion freedom in Madura is becomes very urgent to be raised to the surface, the idea of the issue of religious freedom which is became the ideals of BASRA in Madura is factual to be transformed amid the discourse to make Madura as the Serambi Medinah. Madura piousman Council BASRA tries to transform Islamic teachings primarily in relation to freedom from normative to praxis. For this purpose, the varied model of understanding, ranging from the cultural understanding with the general public, the selective structural and criticize and examine government policies that can erode Indonesia culture generally and Madura in particularly. In the globalization era is a lot of attacking each other by using SARA, whereas NKRI is final which means to be forward-thinking who have agreed we live in diversity that also once practiced the prophet in the Medina charter that is able to serve the minorities such as Jews and Christians.

Keywords: BASRA Piousman, Serambi Medina and Religion Freedom

A. Pendahuluan

Konstelasi kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia, Madura dengan segala potensi yang dimiliki di dalamnya selalu melahirkan wacana-wacana krusial yang cukup unik, mulai wacana menjadi propinsi sendiri sampai pada pemikiran menjadikan Madura sebagai serambi Madinah. Semua itu merupakan dinamika sosial yang terus berkembang di pulau seribu pesantren ini.

Gagasan menjadikan Madura sebagai serambi Madinah merupakan pemikiran unik yang pernah dimunculkan di Madura dan bahkan akan terus digulirkan guna menciptakan kondisi Madura yang tetap berpijak pada nilai-nilai ke-Madinah-an, yaitu satu model kehidupan yang berpijak pada kerangka nilai-nilai agama yang kuat dengan merujuk pada ajaran al-Qur'an dan Hadith Nabi Muhammad SAW.

Dalam aspek keagamaan, Madura didominasi oleh kalangan Muslim tulen yang menguasai di seluruh Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep).¹ Kemunculan isu-isu dan

simbol keagamaan dalam ranah sosial kehidupan Madura merupakan akibat dari hal itu, seperti diungkapkan Abd. A'la, bahwa potret masyarakat Madura sebagai masyarakat dengan keberagaman yang kuat, tapi sekaligus "dianggap" nyaris lekat dengan tradisi atau budaya yang tidak selamanya mencerminkan nilai-nilai Islam mengisyaratkan tentang kompleksitas kehidupan budaya keagamaan masyarakat Madura itu sendiri.²

Simbolisasi komitmen keagamaan itu, salah satunya tergambar dalam rumah-rumah tradisional masyarakat Madura, baik di Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Pamekasan, yaitu dalam setiap rumah pasti memiliki sebuah bangunan *langgher* (*mushalla*) dengan lokasi berada di ujung paling barat sesuai dengan simbolisasi posisi Ka'bah sebagai simbol kiblat umat Islam.³ Tingginya komitmen keagamaan orang Madura biasanya dikongkritkan dengan memberikan kepercayaan sosial yang tinggi terhadap elite-elite agama (kiai/ulama) Madura. Bagi rata-rata orang Madura, kiai/ulama adalah panutan dan pegangan dalam menjalani serta menentukan kehidupan sosial, sehingga

¹ Tingginya apresiasi masyarakat Madura dalam beragama, bisa dilihat betapa antusiasnya masyarakat Madura memakmurkan masjid, mushalla dan langgar yang bertebaran di seluruh penjuru Madura. Kenyataan menunjukkan tentang posisi agama Islam yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Madura. Lihat. KH. Mohammad Tidjani Djauhari, *Membangun Madura* (Jakarta : TAJ Publishing, 2008), 2.

² Lihat. Pengantar Abd. A'la, "*Membaca Keberagaman Masyarakat Madura*", dalam Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura* (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2004), v.

³ A. Latif Wiyata, *Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 46.

dalam ranah sosial, kiai memiliki peran yang strategis di tengah-tengah masyarakat dan masa depan Madura.

Zamakhshari Dhofir menyebutkan bahwa sosok kiai merupakan tokoh sentral dalam kehidupan sebuah pesantren. Dengan integritas kepribadian, wibawa keilmuan dan kharisma kepemimpinannya, seorang kiai menjadi anutan bagi seluruh anggota keluarga, bagi para santri dan bagi komunitas di lingkungan dan di luar pesantrennya.⁴ Kiai adalah *uswatun hasanah*, contoh dan model yang baik dalam seluruh perilaku, tindak tanduk, perangai dan tabiat pribadinya bagi para santri dan komunitas di lingkungannya. Pengaruh kiai terasa tidak saja dalam kehidupan sosial keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sosial politik.⁵

Posisi Kiai di tengah-tengah masyarakat Madura kerap kali diposisikan lebih tinggi dari pada posisi sosial apapun, bahkan dalam derajat tertentu Kiai terposisikan sebagai penguasa sosial dan rujukan yang esensial dalam memetakan dan mengarahkan masa depan pembangunan Madura yang dianggap mampu menggerakkan masyarakat secara kultural, apalagi elit-elit melebur dalam satu komunitas kultural yang kuat, seperti

BASRA (Badan Silaturahmi Ulama Madura).

Sebagai komunitas yang mewadahi para kiai Madura, BASRA acapkali menjadi gawang dan penentu tentang masa depan Madura. Gagasan dan gerakan sosial yang dilakukan BASRA secara langsung dianggap sebagai representasi masyarakat Madura, sehingga berbagai gagasan tentang Madura yang diusung oleh kiai-kiai BASRA juga menjadi kesepakatan masyarakat. Salah satu gagasan besar tentang pembangunan Madura yang hendak diperjuangkan oleh BASRA adalah menciptakan kehidupan Madura yang tetap kental dengan nilai-nilai religiusitasnya.

Secara otomatis, nilai-nilai keislaman akan menjadi nuansa kental dalam pembangunan Madura, karena BASRA merupakan wadah para elit-elit agama Islam, sehingga tidak mustahil dalam setiap gagasan dan gerakan yang ditawarkan akan menimbulkan sesuatu yang bias, terutama terhadap penganut agama lain, apalagi BASRA hanya mewadahi satu elit agama (Islam) dan tidak mengakomodir elit agama yang lain. Padahal, pembangunan dan pengembangan Madura harus didasarkan pada pemikiran semua pihak, tidak hanya didominasi oleh pemikiran pihak dominan, tetapi juga elit-elit agama lain, sehingga akan terjadi sinergi yang ideal dalam membangun

⁴ Faisal Ismail, dkk, *NU, Gusdurisme dan Politik Kiai* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), 21.

⁵ Ismail, dkk, *NU, Gusdurisme*, 21.

Madura, terutama dalam masalah kebebasan beragama dan perlindungan terhadap agama lain.

Melihat konteks ini, gagasan kiai BASRA tentang kebebasan agama di Madura menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk diangkat ke permukaan, sehingga gerakan dan pemikiran kiai-kiai BASRA tidak akan menimbulkan kecurigaan bagi agama lain, karena secara teoritis, pihak dominan acapkali menafikan keberadaan pihak minoritas, sehingga pemikiran tentang masalah kebebasan agama yang menjadi cita-cita BASRA di Madura merupakan sesuatu yang faktual untuk ditransformasi di tengah wacana menjadikan Madura sebagai serambi Madinah, peta dan formulasi pemikiran tentang kebebasan agama yang ditawarkan oleh para kiai Madura dapat menjadi spektrum dalam membangun dan menciptakan kehidupan masyarakat Madura yang universal dan plural.

Hasil riset ini akan difokuskan pada beberapa hal. Pertama, bagaimana peran strategis BASRA sebagai kekuatan elite sosial relegius dalam konstelasi gerakan sosial budaya di Madura? Kedua, bagaimana pandangan kiai-kiai yang tergabung dalam BASRA tentang perbedaan agama di Madura? Ketiga, bagaimana pemikiran kiai-kiai BASRA dalam memposisikan kelompok penganut

agama lain di tengah wacana pembangunan Madura sebagai serambi Madinah?

B. Pembahasan

1. Perspektif Kebebasan Beragama

Kebebasan dalam menganut agama merupakan hak setiap manusia. Memilih agama sesuai dengan keyakinan yang hakiki merupakan fitrah kehidupan manusia. Tak ada manusia manapun yang bisa membatasi ruang keyakinan seseorang, karena memilih keyakinan merupakan wilayah yang privat. Setiap individu memiliki hak asasi manusia yang sama, terutama dalam memilih agama yang diyakini bisa memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan, hak asasi manusia itupun sudah mendapatkan legitimasi dari dunia internasional sebagaimana telah ditegaskan oleh Alim, (2001 : 60) *Declaration of Independence of the United States of America*, yang dideklarasikan oleh *The Representatives of the United States of America* dalam General Congress Assembled, pada 4 Juli 1776.

Berdasarkan pada konteks kebebasan tersebut, setidaknya terdapat empat macam kebebasan yang dimiliki oleh manusia, yang terkenal dengan *The Four Freedoms* yang dimiliki oleh manusia dan hal itu bersifat sangat privat. Kebebasan tersebut

misalnya dalam bentuk kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dari kemiskinan dan kebebasan dari perasaan takut.

Sekian banyak dari berbagai macam kebebasan tersebut, kebebasan dalam memilih agama juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebebasan yang menjadi hak setiap manusia. Sebagai bagian dari hak substansial setiap manusia, memilih agama tentu saja tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan keyakinan manapun. Agama menjadi setiap hak individu sesuai dengan keyakinannya yang sangat substansial. Maka, pemaksaan untuk menganut agama tertentu dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak kemanusiaan yang kejam. Bahkan, negara maupun institusi agama apapun, juga tidak bisa melakukan intervensi untuk memaksa pihak lain agar menganut agama tertentu. Mohamed Talbi dalam Kurzman, (2003 : 232) menyatakan bahwa “Kebebasan agama saat ini telah mengakar dalam kehidupan sosial kita. Sejak Hak Asasi Manusia pada tahun 1945, konsep ini telah muncul sebagai bagian esensial dari hukum internasional. Lebih jauh, Talbi menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk berbeda, dan bahwa planet yang ada telah sedemikian kecil bagi ambisi-ambisi dan mimpi-mimpi. Di dunia baru ini, dalam

periodenya yang pesat, tidak ada lagi ruang bagi yang eksklusif. Keanekaragaman adalah hukum zaman”.

Maka, kebebasan dalam menjadikan agama tertentu sebagai pusat keyakinan, mutlak berada di tangan setiap manusia yang hakiki. Beragama adalah fitrah kehidupan dan memilih agama sesuai keyakinan juga fitrah setiap individu yang bebas. Bahkan, dalam konteks agama Islam, menganut agama tertentu sudah ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa *bagimu agamamu, dan bagiku adalah agamaku*.

Bahkan, arogansi dan pemaksaan dalam beragama, sama sekali tidak dibenarkan menurut al-Qur'an, karena dalam beragama tidak ada paksaan, karena beragama dilandasi oleh satu keyakinan personal yang substansial. Allah menegaskan dalam al-Qur'an: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.

Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Qs. Al-Baqarah: 256): Ayat tersebut menjelaskan tentang penegasian terhadap perilaku beragama yang cenderung memaksa terhadap

keyakinan pihak lain. Istilah pemaksaan yang digunakan oleh al-Qur'an dalam ayat di atas, semakin menegaskan tentang hak kebebasan setiap manusia dalam memilih dan meyakini agama tertentu, termasuk dalam ber-Islam. Karena Islam sama sekali tidak membenarkan adanya pemaksaan terhadap penganut agama lain, Islam tidak pernah mengajarkan pemaksaan untuk mengganti agama tertentu, melainkan Islam menawarkan sebuah konsep keberagaman yang damai dan memberikan keyakinan tentang kebenaran yang hakiki.

Islam telah memberikan pesan yang gamblang tentang keragaman ini. Bahwa pluralitas dalam kehidupan tidak bisa dibantah dengan logika apapun. Jadi, pluralitas dalam beragama menjadi sesuatu yang *given*, nyata dan apa adanya dalam kehidupan umat manusia dalam sepanjang sejarah.

Menurut Said Aqil Sirodj (2006 : 298) bahwa diantara ketentuan Tuhan atas manusia adalah bahwa jagad raya bersifat plural. Dari komunitas manusia saja, Tuhan menjadikan dalam berbagai etnis, bangsa, bahasa, status sosial, dan sebagainya. Lebih jauh Said Aqil Siroj menjelaskan bahwa paham kebangsaan tidak berlandaskan kepada ras tertentu, agama tertentu, juga bahasa tertentu. Paham kebangsaan terformulasikan di atas

sendi-sendi keseriusan dan tekad komunitas manusia untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka.

Berbagai konteks perbedaan agama sejatinya harus ditempatkan dalam ruang lingkup pluralitas yang telah menjadi kodrat dalam kehidupan. Agama yang plural dianut oleh segenap umat manusia, menunjukkan tentang adanya kebebasan bagi setiap individu untuk merayakan pluralitas keagamaan sebagai konsekuensi dari pluralitas kehidupan. Seperti yang ditulis oleh Ngainun Naim bahwa pluralitas merupakan realitas yang lekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia hadir tanpa rekayasa sebagai kehendak Tuhan yang tidak bisa ditolak.⁶

Konsep kerukunan antar umat beragama pada dasarnya berangkat dari konsep kemajemukan dan keanekaragaman dalam hidup. Perbedaan dalam banyak aspek kehidupan merupakan fakta alamiah atau fitrah kehidupan yang tidak bisa dinafikan. Menemukan perbedaan dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang niscaya dan mustahil untuk dinafikan, sehingga pengingkaran terhadap perbedaan manusia dalam berbagai aspeknya bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap

⁶ Lihat Ngainun Naim, *Teologi Kerukunan Mencari Titik Temu Dalam Keragaman* (Yogyakarta : Teras, 2011), 23.

realitas kehidupan yang “sengaja” telah diciptakan oleh Tuhan.

Dalam pandangan Said Aqil Sirajd (2006 : 279-280) bahwa esensi firman Allah itu berlaku bagi semua agama di dunia, terutama agama monoteis (Yahudi, Kristen, dan Islam). Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghuchu, ataupun agama-agama lain, pada hakikatnya sama, yaitu mengakui adanya dzat yang menciptakan dunia dan seisinya. Dzat inilah yang wajib disembah dan ditaati oleh semua orang tanpa pandang bulu, sehingga ketaatan seorang manusia berada di atas ras, golongan, status sosial, warna kulit, serta perbedaan-perbedaan lahiriyah lainnya.

Oleh karena itu, Pandangan Rahardjo (2002:120) perbedaan dan pluralisme (terutama agama) yang ada di dunia ini, pada hakikatnya merupakan sesuatu yang pasti terjadi, sehingga diperlukan kearifan dan kesadaran maksimal untuk meresponnya. Sebab, perbedaan agama yang tercipta, sama sekali bukan merupakan sebuah persoalan yang konflik, yang pada gilirannya melahirkan disharmoni diantara umat beragama itu sendiri, karena perbedaan yang terjadi pada hakikatnya merupakan fitrah kehidupan yang dengan sengaja diciptakan oleh Tuhan. Erich Formm menyebut agama sebagai kecenderungan kodrati manusia

dalam mencari keseimbangan dalam eksistensinya. Dalam pencariannya itu, manusia mencari yang ideal. Dari situlah ia membentuk sistem orientasinya dan pengabdianya. Kecenderungan ini merupakan bagian yang instrinsik dalam eksistensi manusia.

Sementara itu, Muchit Muzadi dalam Ayu Sutarto, (2008 : 100) memberikan ulasan cukup panjang tentang pemahaman saling menghormati ini: Saling mengenal (*lita'arafu*) berarti saling mengerti, saling menghormati, dan saling membantu. Di hadapan Allah, manusia dari kelompok etnik manapun adalah makhluk yang mulia, sebagaimana firman-Nya : *Sungguh, Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka (kami beri kemampuan dalam angkut mengangkut) di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan mereka yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan* (Qs. Al-Isra' : 70).

Berangkat dari sikap *lita'arafu* itu, menurut Muchit Muzadi, “saling mengenal” dan *Karramna* “dijadikan makhluk terhormat” itu, Islam mengatur hubungan antar manusia untuk saling menolong, saling membantu, saling mengasihi, dan saling menasehati. Manusia memiliki bermacam hubungan, baik

hubungan darah, akidah, etnik, profesi maupun ideologis dengan manusia lain.

2. BASSRA dalam Dinamika Sosial Masyarakat Madura

Kiai atau ulama adalah sosok sentral dalam kehidupan umat Islam. Keberadaan kiai menempati pada posisi yang sangat strategis dalam dinamika sosial masyarakat, bahkan kiai kerap kali disebut sebagai pelaku sosial yang cukup urgen dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat dengan komunitas pesantren yang besar. Posisi sentral tersebut terkait dengan kedudukan kiai sebagai orang yang terdidik dan kaya di tengah masyarakat.⁷

Sebagai elit terdidik, kiai identik dengan sosok berpengalaman, terutama pengetahuan agama, dan pada akhirnya kiai dianggap sebagai pewaris para Nabi, dengan keyakinan bahwa kiai memiliki hak otoritas dalam hal-hal keagamaan dan masalah sosial. Posisi semacam ini, konsekuensi dari pengakuan kiai sebagai figur terdidik. Sementara dengan kekayaan yang dimiliki, Kiai menjadi patron, kepada siapa banyak penduduk desa bergantung. Posisi sentral kiai dapat dilihat dalam pola patronase ini, terutama karena pola ini menghubungkan dan mengikat kiai dengan para santri atau siswanya.⁸

Keberadaan kiai di tengah-tengah masyarakat sebagai figur sentral yang menjadi rujukan bagi setiap aspek kehidupan sosial masyarakat, bahkan tidak jarang setiap perilaku dan gagasan kiai dijadikan sebagai rujukan yang absolut di kalangan masyarakat tradisional. Kiai bukan hanya diposisikan sebagai figur sosial yang sentral, tetapi – kadang – lebih dari sekedar itu, yaitu munculnya keyakinan bahwa kiai sebagai pewaris para Nabi. Keyakinan ini pada gilirannya melahirkan posisi melampaui posisi kiai dalam ranah sosial budaya, karena keyakinan kiai sebagai pewaris para Nabi memunculkan keyakinan total bahwa kiai bagian penting dalam dunia kenabian.

Hal ini berakibat, posisi kiai di tengah-tengah masyarakat kultural adalah sebagai figur utama yang menjadi kiblat dalam semua aspek kehidupan sosial, lebih-lebih terutama dalam aspek agama.⁹ Bagi masyarakat kultural (Madura misalnya), perilaku, perbuatan dan dan perkataan kiai dianggap sebagai referensi

⁷ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta : LKiS, 2004), 1.

⁸ Turmudzi, *Perselingkuhan Kiai*, 1.

⁹ Menurut Dirdjosantoso bahwa posisi sentral kiai pesantren dalam konteks sosial keagamaan dan politik, secara historis sudah berlangsung sejak jaman kerajaan. Pengaruh besar dalam urusan politik dan kenegaraan kiai pesantren dapat ditelusuri adanya pemberlakuan desa perdikan bagi desa yang ditempati pesantren. Kondisi tersebut menunjukkan tentang posisi kiai pesantren sebagai kelompok elit mendapat pengakuan publik dan ini sekaligus sebagai bukti kiai pesantren memiliki peran strategis di masyarakat. Lihat dalam Khoiro Ummatin, *Perilaku Politik Kiai* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), 30.

yang tidak terbantahkan, sehingga menjadi sesuatu yang sejatinya harus ditiru dan didengar.¹⁰ Apalagi dalam kehidupan masyarakat kultural, kiai dianggap sebagai pemimpin non formal sekaligus berperan sebagai sosok pemimpin spritual, dan posisi mereka sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah di desa-desa. Akibatnya, perkataan kiai akan selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh para jamaah, komunitas (komonitas santri/alumni santri, *pen.*) dan massa yang dipimpinnya.¹¹

Dalam keterkaitan itu, dalam ranah sosial budaya, kiai tidak saja tampil sebagai broker kebudayaan masyarakat, tetapi bisa menghegemoni kehidupan sosial masyarakat, karena keyakinan pada kiai sebagai figur sosial, acapkali melahirkan kepatuhan yang total kepada kiai yang dalam konteks wacana masyarakat Madura terkenal dengan istilah *sami'na atha'na*, sehingga keberadaan ulama yang tergabung dalam BASRA dapat dijadikan sebagai penentu dinamika pola keberagaman masyarakat Madura dalam setiap waktu.

Kehadiran BASRA dalam dinamika sosial masyarakat Madura, merupakan wadah perjuangan para ulama se-Madura. BASRA dibentuk untuk

membangun kekompakan para kiai, terutama dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di Madura salah satunya adalah rencana industrialisasi di Madura. Rencana membangun industrialisasi di Madura, merupakan inisiatif Presiden BJ. Habibie yang notabene sangat getol mendorong industrialisasi di pulau garam ini, seperti Batam yang cukup berhasil dan maju.¹²

Dari ulasan tersebut, sangat jelas sekali bahwa pembentukan BASRA oleh para ulama se-Madura, merupakan respon sosial terhadap pembangunan industri di Madura, yang secara sosial pasti akan berdampak nyata terhadap dinamika sosial masyarakat Madura, sehingga para ulama perlu bersatu untuk membangun kekuatan sosial dalam menjaga Madura dari dampak-dampak negatif industrialisasi. Faktanya, para ulama dalam BASRA ini, memang menolak kehadiran industrialisasi di Madura, karena dianggap akan merugikan masa depan masyarakat Madura. Penolakan tersebut, tentu saja menjadi tantangan berat dalam misi meng-industrialisasi Madura. Sehingga, pemerintah dituntut untuk melakukan upaya-upaya persuasif agar para ulama

¹⁰ Faisal Ismail, dkk, *NU, Gusdurisme*, 39.

¹¹ Faisal Ismail, dkk, *NU, Gusdurisme*, 39-41.

¹² Disarikan dari hasil wawancara dengan KH. Taufikurrahman FM. Ia merupakan salah satu tokoh ulama Madura yang aktif di BASRA. Ia juga sebagai pengasuh di Pongpes Matlabul Ulum, Jambu Lenteng Sumenep Madura. (Wawancara dilakukan pada 21 Agustus 2017).

Madura bisa memahami tentang signifikansi industrialisasi di Madura.

3. Kebebasan Beragama dan Argumen Kebangsaan Ulama “Dalam Bingkai NKRI”

Pandangan Riaz Hasan tersebut memberikan ilustrasi tentang agama sebagai ciri khas keagamaan seseorang, termasuk umat Islam yang ada di Madura. Bagi masyarakat Madura, Islam telah menjadi identitas yang sangat esensial, sehingga komitmen keagamaan, sebagaimana telah digambarkan di atas, juga terjadi bagi masyarakat Madura yang mayoritas beragama Islam.

Agama merupakan identitas Muslim yang esensial. Hal ini berlaku bagi semua Muslim, baik mereka yang saleh dan menjadi anggota organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah di Indonesia, Jamaat-i-Islami di Pakistan, atau al-Ikhwan al-Muslimin di Mesir, atau mereka yang hidup di lingkungan masyarakat sekuler seperti Kazakhtan dan Turki. Ini juga berlaku bagi mereka yang berada di negara-negara non Muslim seperti India, Thailand, Jerman, Australia atau Amerika Serikat. Konsekwensinya, komitmen keagamaan merupakan bukti sekaligus ungkapan dari identitas Muslim.¹³

Sebagai pulau santri, Madura mencerminkan sebuah daerah dengan penganut Islam yang sangat dominan. Tidak ada data pasti yang menjelaskan, persentase jumlah penganut agama Islam di Madura, tetapi ada yang menyebut umat Islam di Madura mencapai 92 % dari. Angka itu semakin menguatkan tentang dominasi umat Islam di Madura. Hanya sekitar 8 % dari masyarakat Madura yang tidak menganut agama Islam, baik itu Kristen, Budha dan lain sebagainya.

Namun demikian, dominasi umat Islam di Madura sama sekali tidak menjadi ancaman bagi penganut agama non Islam, bahkan keberadaan non muslim di Madura, sama sekali tidak mempengaruhi terhadap ikatan persaudaran sebagai sesama orang Madura. Antara yang muslim dan non muslim, sama sekali tidak sekat pemisah. Agama yang dianut sama sekali tidak dijadikan sebagai alasan untuk menafikan sesama warga Madura. Toleransi telah menjadi kekuatan antara muslim dan non muslim di Madura, sehingga mampu meniadakan potensi konflik karena faktor agama. Hal itu terjadi, karena orang Madura memahami hakikat kebebasan dalam beragama, sehingga tak perlu ada intimidasi dan provokasi dari satu pihak kepada pihak yang lain atas nama agama tertentu, yang pada gilirannya bisa menciptakan keretakan relasi sosial yang

¹³ Riaz Hasan, *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada PPIM UIN Jakarta, 2006), 43.

telah lama terikat sangat kuat. Kebebasan beragama di Madura begitu telah membumi, sehingga mampu memberikan jaminan terciptanya harmonisasi antara umat beragama.

Sebagai elite sosial di Madura, kiai BASRA memiliki pandangan yang sama dalam memahami dan memaknai kebebasan agama di Madura. Sekalipun, umat Islam menjadi penganut agama terbesar di Madura, para ulama BASRA, memiliki cara pandang yang cukup moderat. Prinsip kebebasan beragama yang melandasi cara berfikir mereka adalah komitmen terhadap NKRI dengan segala produk yang ada di dalamnya. Salah satu produk konsekwensi dari NKRI adalah jaminan terhadap keragaman dalam semua aspek, termasuk di dalamnya keragaman dalam beragama. Intinya, NKRI memberikan jaminan kebebasan untuk menganut agama yang diyakini kebenarannya, tanpa diintervensi oleh siapapun.

Mengembalikan kebebasan beragama terhadap NKRI, sebagaimana menjadi dasar berfikir ulama BASRA, menunjukkan tentang pola pikir terbuka terhadap penganut agama lain. Kebebasan beragama yang mendapatkan perlindungan dalam NKRI, pada gilirannya melegitimasi sikap dan perilaku ulama BASRA dalam memaknai perbedaan agama di Madura.

Pandangan itu, salah satunya diungkapkan oleh KH. Taufikurrahman FM. Menurut ulama BASSRA asal Sumenep ini :

Kami tetap dalam bingkai NKRI. Bhinneka Tunggal Ika tetap kita jaga. Kita tetap menghargai perbedaan-perbedaan antar agama. Akan tapi, hal-hal yang wajar. Seperti yang terjadi di Sampang. Ada insiden tentang Tajul Muluk, yang terjadi insiden dengan masyarakat *ahlussunah*, sehingga terjadi korban pembunuhan. Ada satu orang yang meninggal. Kami sikapi masalah itu, baik kepada Menteri Agama dan Kapolda, agar tidak terjadi bentrokan lagi. Karena antara mereka terjadi perbedaan. Tidak mungkin bisa disatukan, tanpa mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka tidak mungkin ketemu, akhirnya mereka (Syiah, *penulis*) diungsikan ke Sidoarjo untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Agar tidak terjadi bentrokan susulan antara Syiah dan Sunni.¹⁴

Ulama di Madura, terutama BASRA sejatinya tidak pernah mempersoalkan kebebasan beragama selama dilakukan dengan konteks yang wajar dan tidak mengganggu penganut agama lain. Kebhinnekaan menjadi dasar berfikir mereka dalam menyikapi perbedaan agama di Madura. Para ulama itu memberikan

¹⁴ Wawancara dengan KH. Taufikurrahman FM dilakukan pada 25 Juni 2017.

penghargaan yang tinggi terhadap kebebasan beragama yang dibenarkan dalam bingkai NKRI, sehingga menjaga dan memelihara keragaman beragama menjadi tugas bersama untuk dijaga. Kiai Hasan (atau kalangan santri biasa memanggil Ra Hasan), salah satu keluarga besar Pondok Pesantren Bata-Bata Pamekasan, juga membenarkan adanya kebebasan beragama dalam wadah NKRI yang telah memberikan jaminan keamanan dalam membumikan kebebasan dalam menjalankan agama yang diyakini oleh warganya. Menurutnya bahwa semuanya dalam bingkai NKRI. Perbedaan apapun yang terjadi, konteksnya mereka tetap dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan NKRI.¹⁵

Ketika NKRI yang menjadi dasar pemikiran, secara otomatis telah memberikan gambaran tentang cara pandang para ulama Madura bahwa konsep final NKRI dianggap sebagai pilihan tepat, karena prinsip yang dibangun dalam NKRI adalah keragaman dalam semua aspek. Semua perbedaan yang menyatu dalam wadah NKRI ibarat telah menjadi satu tubuh, yang tidak terpisahkan, termasuk di dalamnya perbedaan dalam beragama. Kebebasan beragama dalam bingkai NKRI yang menjadi dasar berfikir para

ulama di Madura, secara substansial memberikan isyarat tentang sikap dan respon positif ulama dalam memaknai hubungan agama dengan konsep bernegara NKRI. Artinya, perbedaan agama yang terjadi di Madura, sejatinya ditempatkan sebagai bagian dari khazanah nusantara yang dibenarkan dan dilindungi oleh negara, sehingga penghormatan dan toleransi terhadap keragaman agama menjadi sesuatu yang *given*. Para ulama menerima setiap perbedaan agama di Madura, sebagai konsekuensi dari komitmen menjunjung tinggi konsep negara dalam bingkai NKRI.

Dalam keterkaitan itu, NKRI merupakan refleksi dari negara yang memiliki ciri khas keragaman (pluralitas) yang kuat. Pluralitas itu pada gilirannya diikat oleh satu kekuatan bernama NKRI dan Pancasila sebagai ideologi di dalamnya. Ketika para ulama Madura menyatakan NKRI sudah final, maka keragaman juga sudah bisa dipastikan telah dianggap final, sehingga tak perlu dipersoalkan. Bahkan, wajib diterima apa adanya, dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk saling menyakiti dan menafikan. Menempatkan kebebasan beragama, dalam bingkai NKRI merupakan bentuk pengakuan yang tulus kalangan ulama dalam menerima konsep NKRI secara *kaffah*. Dengan mematok

¹⁵ Wawancara dengan RA. Hasan dilakukan pada 1 Juli 2017.

NKRI sebagai pondasi dalam membangun kebebasan beragama di Madura, sudah pasti akan memberikan keyakinan tentang tumbuhnya toleransi dan kerukunan yang harus dibangun. Karena dalam kebebasan beragama, setiap orang di Madura memiliki hak yang sangat asasi untuk menentukan keyakinan sendiri, tanpa merasa terancam dan ketakutan dari pihak manapun. Sebagaimana komitmen ulama terhadap NKRI, komitmen ulama dalam menjaga kebebasan beragama dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Undang-Undang menjadi komitmen para ulama Madura.

NKRI adalah negara plural yang merangkum keragaman dalam semua aspeknya, termasuk keragaman agama dan keyakinan. Semuanya hidup dan tumbuh subur menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia, bahkan berkembang secara alamiah dalam sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Menurut Listiyono Santoso, bahwa :

Negara yang plural dari segala aspeknya memerlukan hal tidak berasal dari satu aspek. Dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya dalam pluralitas tersebut berakibat pada pereduksian konsep negara bangsa yang di dalamnya berisi berbagai agama, suku, dan bahasa. Karenanya, penerimaan Pancasila dalam

keadaan seperti itu adalah konsekuensi logis yang tidak bisa ditolak.¹⁶

Pancasila yang menjadi dasar NKRI telah menjadi pondasi yang mampu memberikan inspirasi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa, termasuk membangun kehidupan antar umat beragama yang harmonis dan dinamis. Menerima NKRI seperti yang terlihat dalam pandangan para ulama BASRA, berarti telah sepakat dengan ajaran yang tersurat dan tersirat dalam Pancasila. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan bukti adanya komitmen dalam menjaga NKRI secara utuh. Para ulama BASRA, bukan hanya menjadi wadah para kiai berkumpul dan berdiskusi, tetapi juga menjadi pusat perjuangan para ulama dalam menjaga semangat NKRI di Madura, antara lain dilakukan dengan menjaga keragaman melalui transformasi toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Madura.

Apalagi, ulama BASRA telah menyatakan diri sebagai kekuatan strategis dalam mengawal perkembangan masyarakat Madura. BASSRA telah hadir sebagai penjaga marwah masyarakat Madura ; agar tetap eksis dan maju sesuai dengan karakteristik yang telah dimiliki. Sebab, toleransi tidak hanya cukup

¹⁶ Lihat. Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur* (Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2004), 254.

diajarkan, tetapi harus dikawal secara proaktif. Toleransi harus dibangun dengan kesadaran maksimal serta kerja-kerja transformasi dalam ruang-ruang sosial masyarakat Madura. Ngainum Naim menulis bahwa sikap toleransi tidak terbangun dengan sendirinya. Bisa jadi kesadaran tersebut lahir karena dialektika yang berlangsung secara produktif dalam dinamika hidup yang panjang. Sebaliknya, sikap dasar manusia yang tidak toleran akan semakin kukuh dan, dalam kondisi tertentu, memformula menjadi fundamentalisme, ketika menemukan faktor-faktor pendukung.¹⁷

4. Percikan Konflik Agama “Syiah-Sunni Sampang” dan Respon Ulama

Konflik antara penganut Syiah dan Sunni yang pernah terjadi di Kabupaten Sampang, oleh sejumlah kalangan dianggap sebagai bagian dari kejadian yang mengganggu kebebasan diantara umat beragama. Konflik yang sempat melahirkan aksi kekerasan tersebut dan berujung terhadap pengusiran warga Syiah telah menjadi noda tersediri dalam kehidupan keberagamaan di Madura. Sebab, kekerasan terhadap penganut agama, dapat menimbulkan kerenggangan sosial yang bisa mengancam terhadap

semangat kerukunan dan toleransi beragama di Madura. Konflik Syiah dan Sunni yang terjadi di Sampang, secara faktual menjadi bagian fokus perhatian kalangan ulama, karena konflik tersebut bukan hanya telah melahirkan perbedaan pandangan keagamaan, melainkan juga telah melahirkan kekerasan diantara kedua belah pihak. Bahkan, sejumlah kalangan telah memposisikan kasus Syiah di Sampang sebagai bagian kejadian yang telah meruntuhkan kebebasan beragama, dan yang lebih ekstrem kejadian tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Hal itu, misalnya diungkapkan dalam buku Laporan Hak Azasi Manusia Tahun 2014. Berkaitan dengan Kasus Syiah Sampang, dalam laporan tersebut tertulis :

Kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM] terhadap kelompok minoritas beragama dan kepercayaan di Indonesia, telah menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan hingga saat ini. Setidaknya lima tahun terakhir, pelanggaran HAM tidak hanya dialami oleh jamaah Ahmadiyah, namun juga umat Kristiani, bahkan belakangan dialami oleh pemeluk Syiah, di Sampang Madura.¹⁸

¹⁷ Lihat. Ngainum Naim, *Teologi Kerukunan Mencari Titik Temu dalam Keragaman* (Yogyakarta : TERAS, 2011), 43.

¹⁸ Lihat dalam Laporan Hak Azasi Manusia dengan judul “*Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama*,

Berdasarkan kutipan tersebut, kasus kekerasan Syiah Sampang telah dimasukkan sebagai bagian bagian pelanggaran HAM dan secara otomatis – suka atau tidak suka – telah masuk dalam konteks gangguan terhadap kebebasan beragama yang ada di Madura. BASRA secara khusus telah mengambil peran penting dalam penyelesaian kasus Syiah-Sunni di Sampang tersebut. Bahkan para ulama BASRA dengan tegas bahwa praktek keagamaan yang dilakukan oleh warga Syiah di Sampang dianggap telah mengganggu ajaran keagamaan warga Sunni. Ulama yang tergabung dalam BASRA, bahkan memiliki pandangan yang sama tentang perilaku keagamaan Syiah Sampang sebagai perilaku yang menodai prinsip keagamaan dan dapat memacu konflik di tengah-tengah masyarakat.

C. Penutup

Berdasarkan gambaran di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain. Pertama, BASRA sebagai bagian dari waah elite sosial agama di Madura memiliki peran yang penting dan strategis, terutama dalam mengawal perkembangan Madura. Dalam perkembangannya, BASRA telah banyak merespon isu-isu

sosial yang berkembang di Madura, bukan hanya masalah agama tetapi juga masalah pembangunan Madura. Hal itu menunjukkan bahwa BASRA memang memiliki peran strategis dalam dinamika kehidupan masyarakat Madura.

Kedua, para kiai BASRA memiliki pandangan yang sama tentang perbedaan agama sebagai konsekwensi hidup dalam NKRI. Para ulama BASSRA sepakat, perbedaan agama tetap harus dikembalikan pada semangat NKRI yang noateben memberikan peluang yang sama untuk memilih keyakinan dan agama, bahkan hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan.

Ketiga, bagi ulama BASRA penganut agama non muslim adalah sama secara sosial dan memiliki hak yang sama dalam membangun Madura. Bagi ulama BASRA mereka juga harus dihormati, selama tidak mengganggu kehidupan keagamaan masyarakat Madura.

Daftar Pustaka

- Hasan, Riaz, *Keragaman Iman : Studi Komparatif Masyarakat Muslim* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada PPIM UIN Jakarta, 2006.
- Ismail, Faisal, dkk, *NU, Gusdurisme dan Politik Kiai* Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999.

Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia” (Jakarta : Solidaritas Perempuan Indonesia, 2014), 2.

Laporan Hak Azazi Manusia dengan judul
“Pelanggaran HAM dan
Pelanggaran HAM Berat dalam
Kasus-Kasus Kebebasan
Beragama, Berkeyakinan dan
Beribadah di Indonesia” (Jakarta
: Solidaritas Perempuan
Indonesia, 2014.

Naim, Ngainun, *Teologi Kerukunan
Mencari Titik Temu Dalam
Keragaman* Yogyakarta : Teras,
2011.

Rozaki, Abdur, *Menabur Kharisma
Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan
Blater sebagai Rezim Kembar di
Madura* pengantar Abd. A’la,
“Membaca Keberagamaan
Masyarakat Madura”, dalam
Yogyakarta : Pustaka Marwa,
2004.

Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus
Dur* Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2004.

Tidjani, Djauhari, KH. Mohammad,
Membangun Madura Jakarta :
TAJ Publishing, 2008.

Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kiai
dan Kekuasaan* Yogyakarta :
LKiS, 2004.

Ummatin, Khoiro, *Perilaku Politik Kiai*
Yogyakarta : Pustaka pelajar,
2002.

Wawancara KH. Taufikurrahman, FM
dilakukan pada 25 Juni 2017.

Wawancara RA. Hasan dilakukan pada 1
Juli 2017.

Wiyata, A. Latif, *Carok : Konflik
Kekerasan dan Harga Diri
Orang Madura* Yogyakarta :
LKiS, 2006.